

SKRIPSI

**LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA PENDIDIKAN TINGGI
BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES*
(GATS) DAN PERMASALAHAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA**

OLEH :

FIRST SAN HENDRA RIVAI

UNIVERSITAS ANDALAS
0910112081

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

(PK VII)

Pembimbing :

- 1. Zulheri, S.H, M.H**
- 2. Magdariza, S.H, M.H**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

MEI, 2013

**LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA PENDIDIKAN TINGGI
BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES
(GATS) DAN PERMASALAHAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA**

(First San Hendra Rivai, 0910112081, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Hal 71, 2013)

ABSTRAK

Ratifikasi Indonesia atas *Agreement Establishing WTO* yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No.7 Tahun 1994, membawa Indonesia menjalankan perjanjian turunan, salah satunya adalah *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Ada 12 sektor yang masuk kedalam mekanisme perdagangan GATS, salah satunya adalah jasa pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Muncul perdebatan mengenai mekanisme perdagangan jasa pendidikan tinggi dalam GATS, penerapannya dalam aturan hukum Indonesia. Kemudian, terkait dengan dampak pengaturan perdagangan jasa pendidikan tinggi dalam GATS terhadap pemenuhan, perlindungan serta pemajuan hak atas pendidikan di Indonesia. Hal ini akan dijawab melalui metode pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan masalah yang dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendidikan tinggi merupakan sector yang memiliki nilai ekonomis lumayan besar. Semangat ini mempengaruhi aturan-aturan nasional Indonesia yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi kearah liberalisasi dibawah mekanise GATS. Padahal, Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa GATS tidak mengatur secara spesifik mekanisme pengaturan perdagangan pendidikan tinggi. Indonesia sendiri belum mengajukan *Schedule of Commitments*, namun aturan nasional penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah mengarah ke mekanisme *mode of supply* GATS. Hal ini membawa dampak pendidikan sebagai sebuah komoditi yang diperdagangkan, dimana pemenuhan pendidikan sebagai sebuah hak asasi bukan lagi sebuah prioritas, karena pendidikan sudah masuk kedalam mekanisme pasar yang bernilai ekonomis.

Kata kunci : Perdagangan jasa, pendidikan tinggi, hak atas pendidikan

LIBERALIZATION OF TRADE IN HIGHER EDUCATION SERVICES
BASED ON THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES
(GATS) AND MANAGEMENT PROBLEMS IN INDONESIA
(First San Hendra Rivai, 0910112081, Faculty of Law, Andalas University,
71 pages, 2013)

ABSTRACT

Indonesia's ratification to the WTO Agreement Establishing marked by the release of Act 7 of 1994, bringing Indonesia doing a derivative agreement, one of which is the General Agreement on Trade in Service (GATS). There are 12 sectors into the GATS trade mechanisms, one of which is education services, particularly higher education. Debate emerged regarding the mechanism of trade in services in the GATS higher education, the rule of law application in Indonesia. Then, in relation to the impact of higher education services trade arrangements in the GATS to the fulfillment, protection and promotion of the right to education in Indonesia. This will be answered through the normative juridical approach emphasizes the approach to the problem that the legislation in force and the theories that have relevance to the issues to be discussed. Higher education is a sector which has a sizable economic value. This spirit affects the Indonesian national rules regulating the conduct and management of higher education towards liberalization under GATS mechanism. In fact, the Indonesian Constitution states that education is a part of human rights. Based on this, it can be concluded that the GATS does not specifically regulate trade arrangements mechanism of higher education. Indonesia itself has not filed the Schedule of Commitments, but the rules of the national higher education has led to mechanisms GATS modes of supply. This brings the impact of education as a commodity that is traded, where the fulfillment of human rights education as a priority sebauh not anymore, because education has entered into economically valuable market mechanism.

Key words : trade in services, higher education services, right to education